

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS KOMUNITAS

Oleh : **Rahmania Alkadrie**

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Tanjungpura, Pontianak, email: rahmania_alkadrie@yahoo.com

ABSTRACT

Penulisan artikel ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai implementasi kebijakan pengembangan pariwisata berbasis komunitas pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pontianak. Permasalahan mengenai pelaksanaan program pengembangan objek pariwisata di Daerah Kota Pontianak tersebut, maka potensi objek wisata yang terlihat belum dikembangkan (dikelola) atau belum mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah Kota Pontianak, terdapat beberapa objek wisata sejarah yang ada di Kota Pontianak dan menjadi dominan dari urusan Dinas diantaranya adalah seperti Tugu Khatulistiwa, Keraton Kadariah dan makam Kesultanan Pontianak. Mengenai potensi objek wisata yang ada dan belum dikembangkan atau dikelola secara maksimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan komunikasi dalam rangka pengembangan obyek wisata Tugu Khatulistiwa di Kota Pontianak belum berjalan dengan efektif dalam artian belum maksimalnya pelaksanaan komunikasi dua arah dalam mensosialisasikan kebijakan tersebut yang dilakukan di Disbudpar. Disposisi atau sikap pelaksana dari pemerintah Daerah Kota Pontianak melalui Disbudpar Kota Pontianak belum sepenuhnya melakukan evaluasi kondisi objek yang ada dalam menentukan tindakan yang perlu diambil, dengan melakukan perbaikan sarana dan prasarana yang rusak di objek yang bersangkutan. Kemudian sumber daya yang tersedia dalam rangka pengembangan obyek wisata Sungai Kapuas seperti Tugu Khatulistiwa adalah kurangnya pegawai yang berlatar belakang pendidikan kepariwisataan, sarana dan prasarana yang tersedia belum memadai, masih minim (belum optimal) yang bergerak maupun tidak bergerak. Oleh karena itu, perlu adanya saling tukar informasi mengenai bidang kepariwisataan, adanya hubungan kerja sama yang baik, tersedianya data yang akurat mengenai profil obyek wisata yang ada di Kota Pontianak, adanya komitmen dalam rangka promosi wisata dibuat stiker, brosur serta iklan tentang potensi wisata.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan Pariwisata, Pengembangan Pariwisata dan Wisata, Berbasis Komunitas

ABSTRACT

Writing this article is intended to provide an understanding of the implementation of community -based tourism development policy at the Department of Tourism Kabudayaan and Pontianak . Issues concerning the implementation of development programs in the Regional tourism attractions such Pontianak , the attraction potential seen yet developed (managed) or has not received the attention of the Regional Government of Pontianak , there are several historical attractions in the city of Pontianak and the dominant of the affairs of the Department of of them are like the Equator Monument , Kadariah palace and tomb of Pontianak Sultanate . Regarding the potential of existing attractions and have not developed or managed optimally . The results showed that the implementation of the communication in order to develop tourism Equator Monument in Pontianak has not run yet in terms of maximum effective implementation of two-way communication in disseminating these policies are carried out in Disbudpar . Disposition or attitude of local government implementers through Disbudpar Pontianak Pontianak not fully evaluate the condition of existing objects in determining the action to be taken , by improving facilities and infrastructure damaged in the object in question . Then the available resources in order to develop tourism as the Equator Monument Kapuas River is the lack of personnel educational background in tourism , infrastructure and facilities available is not adequate , still minimal (not optimal) is movable or immovable . Therefore , the need for exchange of information on the field of tourism , the presence of a good working relationship , the availability of accurate data on the profile of existing attractions in Pontianak , the commitment made in the context of tourism promotion stickers, brochures and advertisements about tourism potential .

Keywords : Implementation of Tourism Policy, Tourism Development and Tourism, Community Based

A. PENDAHULUAN

Kota Pontianak ditinjau dari letak geografis, keadaan alam, kebudayaan dan sarana penunjang mempunyai potensi yang cerah dibidang pariwisata, baik berupa wisata alam, wisata budaya maupun wisata sejarah untuk ruang lingkup Kota Pontianak. Potensi pariwisata yang dimiliki diharapkan dapat menjadi sektor andalan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sesuai dengan amanat pola dasar pembangunan daerah, kebijaksanaan pembangunan kepariwisataan pada pokoknya adalah meningkatkan objek wisata dan peran serta pihak swasta serta masyarakat setempat. Peningkatan pariwisata di Kota Pontianak sebagai sektor andalan, maka kebijaksanaan yang ditempuh adalah mengembangkan pariwisata yang mantap, seperti menyusun rencana pengembangan pariwisata dengan melalui promosi. Berlakunya Undang-Undang, Nomor: 10 Tahun 2009, tentang kepariwisataan, akan memberikan peluang yang sangat luas, bagi Pemerintah Kota Pontianak, untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya, termasuklah potensi sektor pariwisata. Karena saat ini Kota Pontianak telah menjadi tujuan wisata utama di Kalimantan Barat. Destinasi Kota Pontianak sebagai destinasi utama di Kalimantan Barat yang didukung oleh berbagai keunikan dan keberagaman daya tarik yang telah dikemas menjadi paket wisata yang dapat dinikmati oleh para wisatawan. Beberapa diantaranya adalah Tugu Khatulistiwa, Keraton Kadariah, Rumah Melayu, Replika Rumah Betang, Museum Provinsi, Alun Kapuas, Kampung Beting, Masjid Jami', Makam Kesultanan Pontianak, Vihara Bodhisatva Karaniya Metta dan Aloe vera Center, (Renstra Disbudra Kota Pontianak).

Pada kenyataan menunjukkan bahwa potensi objek wisata Kota Pontianak khususnya objek wisata Tugu Khatulistiwa yang terletak di Kecamatan Pontianak Utara belum dikelola atau belum mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah secara optimal sesuai dengan Intruksi Presiden Republik Indonesia, Nomor: 16 Tahun 2005, tentang kebijakan pembangunan kebudayaan dan pariwisata. Fenomena atau identifikasi dari permasalahan tersebut adalah 1) Lemahnya komunikasi sehingga dalam melaksanakan tujuan-tujuan pembangunan pariwisata pemerintah kota belum mempunyai pranata yang mudah menerima inovasi baru yang bermanfaat bagi pembangunan pariwisata. Hal tersebut

mengakibatkan adanya kerusakan atau perubahan permanen fisik pada Tugu Khatulistiwa sebagai akibat dari kurangnya pemeliharaan asset wisata tersebut oleh pemerintah, 2) Lemahnya disposisi atau sikap pelaksana terhadap kebijakan Pemerintah Kota Pontianak dalam pengelolaan Tugu Khatulistiwa dengan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan. Hal tersebut mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya investor yang mau menanamkan modal, 3) Rendahnya sumber daya aparatur sehingga belum terwujudnya pengembangan objek wisata khususnya Tugu Khatulistiwa. Hal tersebut terlihat tidak adanya pegawai yang berlatar belakang pendidikan kepariwisataan, sarana dan prasarana belum memadai, masih minim (belum optimal) yang bergerak maupun tidak bergerak, kondisi perkantoran yang masih kurang mendukung, Infra struktur maupun supra struktur kepariwisataan belum memadai dan kurang peran serta masyarakat terhadap pembangunan kepariwisataan, karena masyarakat masih menganggap bahwa pariwisata hanya sebatas jalan-jalan, rekreasi atau hiburan.

B. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Implementasi adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengopersikan sebuah program, dengan tiga kegiatan sebagai pilarnya, sebagaimana dinyatakan Jones (2004:46) yaitu:

- a. Pengorganisasian, yaitu menyangkut pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit dan metode untuk menjadikan program.
- b. Interpretasi, yaitu menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarah yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.
- c. Aplikasi/penerapan, yaitu ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan program.

Jamas. E Anderson (dalam Subarsono, 2005:113), menyatakan kebijakan publik adalah "menunjuk pada perilaku aktor, seperti pejabat atau lembaga pemerintah dalam menangani bidang kegiatan tertentu". Berdasarkan kedua pendapat tersebut, maka teori Jones yang lebih tepat menjadikan dasar dalam penelitian ini, karena seperangkat kegiatan yang akan dilakukan dengan penggunaan sumber-sumber daya yang tersedia dan menghasilkan manfaat dan memiliki karakteristik dalam pelaksanaan program yang harus mempunyai batasan yang jelas serta sasaran yang dapat diukur dan dapat dipergunakan sebagai alternatif untuk mempertimbangkan setiap kegiatan dalam pencapaian sasaran, khususnya kebijakan pengembangan pariwisata. Sementara dibandingkan dengan teori James. E Anderson lebih menekankan kepada pelaku aktor

sebagai serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan bersifat politis.

Menurut teori Edward III (dalam Tachjan, 2006:12) ada empat hal yang mempengaruhi terlaksananya implementasi kebijakan: 1) Komunikasi, 2) Disposisi /sikap pelaksana, 3) Sumber daya, 4) Struktur Birokrasi. Implementasi kebijakan berdasarkan teori Edward III tersebut menyangkut tindakan yang dapat langsung dilaksanakan maupun berupa suatu tindakan yang memerlukan produk turunannya agar dapat dilaksanakan secara jelas oleh pelaksana kebijakan di tingkat bawah. Agar kebijakan publik dapat terselenggara dengan efektif, maka dalam proses mengimplementasikan harus mencakup komunikasi, disposisi, sumber daya yang tersedia dan struktur organisasi.

Pengembangan objek pariwisata, dapat pula dilihat sebagai suatu kesatuan dari berbagai kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan, agar memperoleh manfaat (*benefits*) dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang, dengan pengorbanan biaya (*cost*) di masa sekarang. Suatu kegiatan pengembangan sektor pariwisata, selalu mempunyai titik kegiatan awal (*starting point*) dan titik kegiatan akhir (*ending point*) serta selalu mempunyai tujuan berupa manfaat tertentu yang ingin dicapai. Kegiatan pengembangan menurut Mustopadidjaya (2006:115) merupakan suatu "langkah kebijaksanaan yang berisikan sejumlah kegiatan yang merupakan suatu kesatuan dan mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu". Sebagaimana telah dijelaskan di depan, bahwa pengembangan adalah suatu proses penerapan langkah-langkah kegiatan yang dilakukan pada masa datang, dengan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi.

Berdasarkan pengertian tersebut, dalam dunia kepariwisataan, dapat diidentifikasi bahwa pengembangan kepariwisataan memuat indikator seperti definisi kebutuhan, penilaian potensi, dukungan komunitas, lingkungan legal, penjadwalan, pengalaman, pengukuran dan fleksibilitas. Mill, (2006:198). Pada hakikatnya pengembangan adalah suatu proses, di mana masalah yang hendak diberikan pemecahannya berfungsi sebagai masukan (*input*), dan rencana kongkrit yang berhasil disusun dengan baik merupakan *output*-nya. Agar *input* dapat diubah menjadi *output* yakni mengubah permasalahan atau tantangan menjadi rencana kegiatan yang realistis. Musanef (2006:52) menyebutkan bahwa langkah-langkah yang harus ditempuh dalam melakukan pengembangan suatu kebijakan (pariwisata) adalah: "Menetapkan tugas dan tujuan, Mengobservasi dan menganalisa,

mengadakan kemungkinan-kemungkinan, serta membuat sintesa dan menyusun rencana.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan mengungkapkan pelaksanaan komunikasi, disposisi dan sumber daya kebijakan pengembangan objek wisata tugu khatulistiwa di Kota Pontianak berbasis komunitas. Informasi kunci pada penelitian ini yaitu : 1) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pontianak, 2) Kepala Bidang Pariwisata, 3) Kepala UPTD Tugu Khatulistiwa dan 4) Masyarakat sekitar objek wisata sebanyak 5 orang. Teknik pemilihan subjek penelitian digunakan dengan teknik bertujuan (*purposive*) maksudnya penentuan subjek penelitian diambil kepada orang-orang yang banyak mengetahui permasalahan atau yang terlibat langsung dalam permasalahan yang diteliti.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis data kualitatif yang diperoleh dengan melakukan wawancara dan mendokumentasikan beberapa obyek yang menjadi bahan penelitian.

D. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN POTENSI OBJEK WISATA TUGU KHATULISTIWA DI KOTA PONTIANAK BERBASIS KOMUNITAS

1. Komunikasi

Sebagai Ibu Kota Provinsi, Kota Pontianak yang mempunyai potensi objek wisata terus berupaya untuk menggali dan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimilikinya dalam upaya memperoleh pendapatan dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Berbagai sektor telah dikembangkan sesuai dengan potensi daerah dan memanfaatkan keterkaitan dengan daerah lain. Dalam beberapa tahun mendatang diharapkan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan saat ini dapat terlihat.

Kepala Bidang Pariwisata, mengemukakan bahwa:

"Adanya kebijakan pemerintah daerah mengenai objek wisata tugu khatulistiwa berbasis komunitas sangat membantu masyarakat dalam pengembangan pariwisata pada suatu lokasi sumber daya wisata Kota Pontianak, sehingga dapat memberikan dampak positif dan negatif terhadap lingkungan sekitarnya. Kemudian Pengembangan objek wisata tugu khatulistiwa yang ada di Kota Pontianak belum dapat mendukung pengembangan wilayah secara umum, karena sosialisasi mengenai potensi objek belum terlaksana sesuai dengan harapan, sehingga masyarakat selama ini belum mengetahui pola pengembangan pariwisata di Kota

Pontianak, seperti belum sepenuhnya melibatkan masyarakat lokal dengan mengarah kepada sasaran pemberdayaan masyarakat lokal dalam kaitannya dengan pengembangan pariwisata”.

Lebih lanjut Kepala Disbudpar Kota Pontianak, menyatakan bahwa:

”Kegiatan komunikasi yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan kebijakan pengelolaan pengembangan objek wisata tugu khatulistiwa berbasis komunitas dengan masyarakat lokal adalah melakukan sosialisasi mengenai dasar hukum yang menunjang kebijaksanaan dengan pemerintah dengan membentuk tim sosialisasi yang melibatkan unsur-unsur pemerintah kota, kecamatan dan kepala kelurahan serta pihak perusahaan dalam rangka Perbaikan sarana dan prasarana transportasi menuju pusat pelayanan masing-masing wilayah pelayanan wisata, diarahkan untuk dapat memberikan kemudahan pergerakan dan distribusi orang dan barang dari wilayah yang bersangkutan ke pusat kota atau ke luar Kota Pontianak”.

Berdasarkan keterangan dari hasil wawancara dengan masyarakat sekitar obyek, diperoleh keterangan bahwa:

”Sebagian besar masyarakat belum memahami informasi yang disampaikan mengenai adanya kebijakan pemerintah dalam rangka pengembangan objek wisata tugu khatulistiwa di Kota Pontianak berbasis komunitas”.

Hasil wawancara dari berbagai sumber dapat ditelaah bahwa pengembangan objek wisata Tugu Khatulistiwa di Kota Pontianak belum menunjukkan hasil yang memuaskan, hal ini dapat dimaklumi bahwa pada hakekatnya pembangunan di bidang informasi, komunikasi, pariwisata, merupakan kegiatan untuk menginformasikan dan mempromosikan seluruh aspek-aspek pembangunan yang ada di daerah Kota Pontianak belum terlaksana. Selain itu juga sebagai salah satu aspek untuk menarik wisatawan yang tentunya dengan jalan menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan minat wisatawan.

2. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Sikap pelaksana dalam pengembangan objek wisata tugu khatulistiwa di Kota Pontianak berbasis komunitas, yaitu menyangkut strategi yang telah dilakukan sekarang. Untuk itu maka perumusan strategi yang dilakukan tersebut pada dasarnya perlu memedomani para pemimpin dalam menetapkan aktivitas yang akan ditekuni organisasi sebagai tujuan akhir yang ingin dicapai. Disposisi yang dilakukan sebagai strategi penyempurnaan dari ancangan perencanaan jangka panjang. Proses untuk membuat strategi biasanya perlu diawali dengan penetapan visi – misi organisasi sampai penetapan strategi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Disbudpar Kota Pontianak, diperoleh keterangan

Bahwa:

”Sikap pelaksana dalam mendukung program pengembangan obyek wisata tersebut, ditetapkan dengan melalui diversifikasi jenis kegiatan wisata yang akan dikembangkan dengan mengeksplorasi sesuatu yang baru serta pengaturan rute wisata, intensifikasi dan revitalisasi objek-objek wisata yang telah ada, strategi diversifikasi jenis kegiatan wisata dan pengaturan rute wisata diarahkan untuk dapat memberikan keragaman pengalaman dan pilihan kepada wisatawan yang melakukan kegiatan objek wisata tugu Khatulistiwa. Kreatifitas di dalam penciptaan dan pengembangan jenis kegiatan wisata tersebut, diharapkan dapat dihasilkan suatu jenis kegiatan yang berkualitas dan bernilai jual tinggi. Sedangkan strategi pengaturan rute wisata dimaksudkan untuk mempertinggi daya dukung pada masing-masing titik sumber daya wisata”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pariwisata, mengungkapkan bahwa:

”Pengembangan objek wisata Sungai Kapuas khususnya Tugu Khatulistiwa, ada beberapa sikap dan tindakan yang diambil untuk mendukung strategi tersebut diantaranya pembuatan film dokumentasi mengenai objek wisata, mendokumentasikan sumber daya wisata yang ada, menciptakan berbagai alternatif paket jenis kegiatan wisata. Sementara program pengembangan yang sudah dilaksanakan belum optimal seperti melakukan atraksi wisata budaya melalui event-event wisata yang menggunakan akar budaya tradisional buru, pengembangan *Spiritual Tourism*, merencanakan dan menyusun rute wisata, meningkatkan jaringan komunikasi dengan masyarakat dalam penggalan dan pengembangan potensi budaya dan kawasan tujuan wisata”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat dinyatakan bahwa:

”Objek wisata Sungai Kapuas seperti Tugu Khatulistiwa sampai saat ini belum ada perubahan dan terlihat kumuh, sehingga para wisatawan mau berkunjung di Tugu Khatulistiwa ini sangat kurang, sementara potensi objek wisata tersebut cukup berpotensi apalagi dekat dengan Sungai Kapuas”.

Tindakan yang dilakukan untuk mendukung strategi pengembangan objek wisata Tugu Khatulistiwa, dapat ditelaah bahwa pemerintah daerah belum sepenuhnya melakukan mengevaluasi kondisi objek yang ada untuk menentukan tindakan yang perlu diambil, melakukan revitalisasi objek wisata yang ada melalui perbaikan sarana dan prasarana yang rusak di objek yang bersangkutan, menyusun *site plan* dan mengembangkan rencana pengelolaan, penyempurnaan sistem *ticketing* yang handal dan berkeadilan, Menjadwalkan kembali event-event pariwisata yang telah ada dan optimalisasi kualitas pelayanan.

Disposisi yang dilakukan pemerintahan Kota Pontianak melalui Disbudpar merupakan hasil kerja dan kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi yang bersangkutan, atau

dengan kata lain kemajuan dan kinerja suatu organisasi publik sangat tergantung kepada kemampuan dan etos kerja para *stakeholders* yang berkepentingan dengan organisasi. Kemampuan dan etos kerja dimaksud adalah kemampuan dan etos kerja didalam mengoptimalkan dimensi-dimensi territorial aktivitas organisasi publik baik dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, dan teknologi, implicit kemampuan menciptakan kesejahteraan setiap warga masyarakat maupun *stakeholders*.

3. Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, sumber daya disini tidak terlepas dari Sumber Daya Aparatur. Karena Sumber Daya Aparatur sebagai pelaksana kebijakan pengembangan objek wisata sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang dimiliki serta memiliki arti yang penting dan sangat strategis. Karena melalui tingkat pendidikan dapat meningkatkan ketrampilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Berdasarkan informasi dari Kepala Bidang Pariwisata mengungkapkan bahwa:

“Pegawai yang menangani bidang kepariwisataan sebanyak 6 orang, tidak ada satupun yang tingkat pendidikan spesialisasi ilmu kepariwisataan. Sementara yang menyandang sarjana S-1 hanya 10 orang dengan spesialisasi sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Sarjana Sosial dan Sarjana Ilmu pemerintahan. Jumlah pegawai Bidang Pariwisata masih sangat terbatas, kalau dibanding aktivitas yang dilakukan. Hal tersebut sangat menyulitkan bagi pegawai Disbudpar melaksanakan tugas di bidang kepariwisataan apa lagi bila dibandingkan dengan jumlah objek wisata yang sangat banyak. Kondisi sebelum dileburkannya Dinas Pariwisata jumlah sumber daya manusia dan tingkat pendidikan mencukupi sehingga setiap kalender kegiatan untuk memantau objek wisata yang ada dapat terlaksana, sedangkan sekarang untuk memantau dan memonitor tiap objek wisata dilaksanakan bila ada hal mendesak”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas menyatakan bahwa:

“Pendidikan dan latihan bidang kepariwisataan yang diikuti oleh pegawai terasa sia-sia karena yang bersangkutan tidak dapat bertugas pada Disbudpar untuk mengelola dan mengembangkan pariwisata. Seharusnya sumber daya aparatur yang sudah mengikuti pendidikan dan latihan fungsional maupun bidang kepariwisataan tetap dipertahankan untuk melaksanakan tugas dibidang kepariwisataan, bukan seperti sekarang pegawai tersebut disebarkan pada kantor dan dinas lainnya”.

Berdasarkan hasil wawancara dapat ditelaah bahwa jumlah sumber daya aparatur yang dimiliki oleh Disbudpar berjumlah 35 orang apabila dibandingkan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Akibat kekurangan pegawai ini, menyulitkan Bidang Pariwisata dalam melanjutkan program pengembangan objek

wisata Sungai Kapuas, khususnya Tugu Khatulistiwa.

Tingkat pendidikan formal yang dimiliki oleh Bidang Pariwisata kurang memadai karena ada salah satu jabatan yang masih diisi oleh tingkat pendidikannya masih Sarjana Muda dan seorang staf tamatan SLTA, sehingga dapat mengganggu kelancaran program pengembangan objek wisata Sungai Kapuas dalam membuat berbagai perencanaan. Pendidikan dan latihan bidang kepariwisataan serta tingkat pendidikan dan latihan fungsional sangat mempengaruhi efektivitas program pengembangan objek wisata Sungai Kapuas karena telah mengikuti pendidikan dan latihan bidang kepariwisataan maka dalam perencanaan dan kelanjutan program pengembangan objek wisata dapat terlaksana dengan baik. Sedangkan kondisi saat ini pendidikan dan latihan bidang kepariwisataan yang belum diikuti oleh para Kasi pengembangan dan promosi pariwisata, dan begitu juga dengan seorang staf dan Kepala Bidang Pariwisata sehingga dapat mengganggu kelancaran program pengembangan objek wisata.

E. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis mengenai Implementasi kebijakan Pengembangan Pariwisata Berbasis Komunitas Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pontianak (Studi Kasus Objek Wisata Tugu Khatulistiwa), dapat diperoleh simpulan sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan komunikasi dalam rangka pengembangan obyek wisata Tugu Khatulistiwa di Kota Pontianak belum berjalan dengan efektif dalam artian belum maksimalnya pelaksanaan komunikasi dua arah dalam mensosialisasikan kebijakan tersebut yang dilakukan di Disbudpar, jika dilihat dari rincian yang digunakan dalam penelitian ini. Hal ini, terjadi karena upaya yang telah dilakukan oleh instansi tersebut dalam mensosialisasikan aturan organisasi menjadi mubasir, karena informasi yang disampaikan tidak mendapat respon positif dari masyarakat;
- 2) Disposisi atau sikap pelaksana dari pemerintah Daerah Kota Pontianak melalui Disbudpar Kota Pontianak belum sepenuhnya melakukan evaluasi kondisi objek yang ada dalam menentukan tindakan yang perlu diambil, dengan melakukan perbaikan sarana dan prasarana yang rusak di objek yang bersangkutan, menyusun dan mengembangkan rencana pengelolaan, penyempurnaan dan menjadwalkan kembali

- event-event pariwisata yang telah ada dan optimalisasi kualitas pelayanan;
- 3) Sumber daya yang tersedia dalam rangka pengembangan obyek wisata Sungai Kapuas seperti Tugu Khatulistiwa adalah kurangnya pegawai yang berlatar belakang pendidikan kepariwisataan, sarana dan prasarana yang tersedia belum memadai, masih minim (belum optimal) yang bergerak maupun tidak bergerak, kondisi perkantoran yang masih kurang mendukung, infra struktur maupun supra struktur kepariwisataan belum memadai serta tidak ada gagasan atau ide segar dalam rangka pengembangan pariwisata dan etos kerja sangat rendah.

F. REFERENSI

- Jones, C.O. 2004. *Pengantar Kebijakan Publik*. Terjemahan Ricky Istanto. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Mill, Robert, 2006, *Tourism The International Business (Edisi Bahasa Indonesia)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mustopadidjaya, A.R., 2006, *Kebijaksanaan dan Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Musanef, 2006. *Manajemen Usaha Pariwisata di Indonesia*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
Jalan Prof.Dr.H.Hadari Nawawi, Pontianak Kotak Pos 78124
Homepage: <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email: jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : RAHMANIA ALKADRIE
NIM / Periode lulus : 621110104
Fakultas/Jurusan : FISIPOL / ILMU ADMINISTRASI NEGARA
E-mail address/HP :

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Publika *) pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **):

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARAWISATA
BERBASIS KOMUNITAS

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- secara *fulltext*
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal

Dr. Etan M. Si
NIP. 196707272005011001

Dibuat di :
Pada tanggal:

(RAHMANIA ALKADRIE)
nama terang dan tanda tangan mhs

catatan:

*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author).